



**DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**

RENCANA KERJA TAHUN 2026

JL. JEND. A. YANI NO.11 TELANAI PURA –
KOTA JAMBI

 0741 - 61740-60804

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Hidayah- Nya maka “ Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2026 dapat kami selesaikan.

Laporan ini merupakan rancangan awal dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2026, yang berisikan 7 (tujuh) program prioritas dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dalam rangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang bersumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Jambi.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini di susun untuk dapat menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Desember 2025

Kepala Dinas



Drs. Sardaini, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19670520 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	59
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	66
3.3 Program dan Kegiatan	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk periode lima tahunan (jangka menengah) serta periode tahunan (jangka pendek).

Dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sedangkan perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 273 ayat (2) disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

.



sumber: Bappenas, 2014

Gambar 1.1.
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029. Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026, dimana dokumen tersebut dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terhadap kondisi eksisting Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025– 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).;

22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 48);
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi di Tahun 2026, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi secara berkesinambungan.
2. Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi (yang berisi : Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan/ sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan/ sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Faktor faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, Analisis kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Bab ini menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang akan dicapai beserta program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Bab ini memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, meliputi Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan, dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

Bab V. Penutup

Bab ini ditegaskan hal-hal yang perlu diperhatikan, baik dalam rangka pelaksanaan, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2024

Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 ini merupakan Renja tahun ketiga dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, maka dalam pelaksanaannya diperlukan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2021 – 2026, sampai dengan akhir periode renstra secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kerjanya yang berhasil direalisasikan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan.

Dari data pelaksanaan Renja Tahun 2025, secara umum pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai indikator kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun disamping itu masih terdapat indikator kinerja yang belum sesuai target yang disebabkan beberapa faktor. Terhadap capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2025-2029, disimpulkan telah sesuai dengan perencanaan walaupun masih terdapat catatan-catatan untuk beberapa indikator yang perlu

mendapatkan perhatian dan pengawalan agar tidak keluar dari target yang direncanakan. Dan terhadap target capaian di akhir periode Renstra memiliki peluang yang besar untuk tercapai.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja pada tahun 2025 antara lain dikarenakan kegiatan tersebut telah direncanakan dengan baik; proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan lebih awal, waktu pelaksanaan terkontrol dengan baik; kerjasama dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar sehingga memudahkan untuk pemanfaatannya. Sementara, faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan:

- 1) Adanya refocusing anggaran tahun 2025 di Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyebabkan dilakukan penyesuaian dengan memprioritaskan kegiatan yang lebih terfokus dalam pencapaian target sasaran serta program yang tertuang dalam dokumen RPJMD, terlebih pemenuhan target yang belum tercapai.
- 2) Terbatasnya jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dengan banyaknya ASN Dinas Koperasi, UKM yang memasuki usia pensiun tanpa ketersediaan pengganti secara proporsional, menyebabkan ketimpangan proporsi sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Dalam rangka memenuhi target kinerjanya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan/kapasitas profesional dan teknis yang memadai dengan intensitas kerja yang cukup tinggi. Idealnya satu jabatan Pengawas didukung oleh 2 (dua) pelaksana sesuai fungsinya, sehingga meningkatkan profesional kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Selain itu juga sangat dibutuhkan jabatan fungsional pengawas koperasi dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) pegawai.

Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu:

- 1) Penyesuaian target kinerja dalam perubahan Renja sebagai akibat dari pengurangan anggaran tahun 2025;
- 2) Optimalisasi pegawai yang ada dengan distribusi beban kerja dan pelibatan antar unit kerja, serta intensifikasi jam kerja;
- 3) Responsif terhadap terjadinya perubahan peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah;
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau praktek dengan tugas khusus; dan
- 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah kabupaten untuk merespon perubahan peraturan dan kebijakan yang terjadi.
- 6) Mengubah metode pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pertemuan atau rapat virtual dan mengoptimalkan penggunaan teknologi IT.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 selengkapnya diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian 2025 (n-1)	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Predikat AKIP Pemerintah Daerah	A	B	A	BB	86,49%	B	BB	BB
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	40%
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	20%
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	-	-	-		3 Laporan	3 Laporan	30%
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	100%	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	85,71%

2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	60 Orang	100%
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	25 Paket	25 Paket	100%
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	400 Paket	500 Paket	500 Paket	100%	550 Paket	550 Paket	22%
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit mobil dan 3 unit motor	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit mobil	2 Paket	4 unit	1 unit mobil	25%	-	-	-

2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Item	4 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	-	-	-
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 item	4 Paket	4 Unit	4 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	125%
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 item	-	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	20%
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	20%
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	37 Unit	100%	-	-	100%	100%	100%
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	-	37 Unit	37 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-

2.17.01.1.09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki	2unit	70 unit	-			-		
2.17.01.1.09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	2 unit	70 Unit	70 unit	100%	70 Unit	70 unit	100%
2.17.01.1.09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		-			-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	-			-		
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	151 KSP/USP	20 kSP	0	0				
2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	151 KSP/USP	20 kSP	-	-	-	-	-	-
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	151 KSP/USP	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	19,86%
		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab /Kota	-	20 KSP	20 KSP	20 KSP	100%	20 KSP	20 KSP	100%
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang , Kantor cabang , Kantor Cabang Pembantu	3 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kas Pembant	-	-	-	-	-	-	-
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-

	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1	45%	-	-	-	-	-	-
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	0.50	100%	45%	45%	100%			
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan	134 Unit/Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	3 Dokumen	20 Koperasi	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	-	20 koperasi	-	-	-	-	-	-
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	120 Unit Usaha	20 koperasi	-	-	-	-	40 koperasi	40%
2.17.03.1.02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		21 koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi	100%	-	-	-
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	125 koperasi	21 koperasi	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Koperasi yang akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan Masyarakat		20 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-

2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat	0.50	20	45%	45%	100%			
2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	25 koperasi	20 koperasi	22 koperasi	9 koperasi	100%	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	
2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan, kualitas Aktiva, Produktif, Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	121 Unit Usaha	20 koperasi	-	-	-	-	-	-
2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		5%						
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	0.25 (25%)	510 Orang	5%	5%	100%			
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun	0.25 (25%)	100%	510 Orang	510 Orang				
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2500 Orang	500 orang	800 orang	1290 orang	161,25%	800 Orang	800 Orang	40%
		Jumlah peserta Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum	-	40 Koperasi/UKM	150 UKM	150 UKM	100%	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan Akses dan Literasi Keuangan		35 Orang	90 Koperasi/UKM	90 Koperasi/UKM	100%			
		Jumlah peserta pelatihan Akses Pemasaran		-	-	-	-			
		Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis		75 Orang	510 orang	510 orang	100%			
		Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian		75 Orang	90 Orang	90 Orang	100%			

		Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan		75 UKM	180 UKM	180 UKM	100%			
		Jumlah peserta pelatihan Manajerial		89 Orang	90 Orang	90 Orang	100%			
		Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi		40 Orang	90 Orang	90 Orang	100%			
		Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian		-	90 Orang	90 Orang	100%			
		Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping		-	-	-	-			
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			-	-	-	-			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM		450 Orang	3,69%	-	-	-			
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)	23,45%	3,69%	3,69%	3,69%	100%			
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	23,45%	-	-	-	-	-	-	-
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha		25 Koperasi	-	-	-			
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Kegiatan Bimtek Koperasi Des Wisata		-	-	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB	6 kali	-	-	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	6 kali	-	-	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha	6 kali	-	-	-	-			

		koperasi lintas daerah kabupaten kota								
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali	-	-	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali	-	-	-	-			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	5 kali		-	-	-			
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		1 kali	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Sosialisasi / penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat	25 kali							
		Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	5 kali		1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas	5 kali							
		Peringatan Hari Koperasi Nasional TK nasional dan Provinsi	1 kali							
		Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina	4 kali							

		Rapat Monitoring Evaluasi Data ODS KUMKM Kab/kota/Se Provinsi Jambi			1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	10 Dokumen							
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	21,6%						
		Diseminasi Badan Konsultasi Hukum Koperasi bagi Gerakan Koperasi Provinsi Jambi			40 Orang	40 Orang	100%			
		Diseminasi Koperasi Perkebunan dengan Lembaga Keuangan			22 Orang	22 Orang	100%			
		Rakorwil Dekopinwil Kabupaten Kota Se- Provinsi Jambi			31 Orang	31 Orang	100%			
		Workshop BWKK bagi Kopwan Provinsi Jambi			40 Orang	40 Orang	100%			
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	-	-			100%			
		Diseminasi Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Wisata			20 Orang	20 Orang	100%			
		Bimtek Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi Binaan Provinsi Jambi			20 Orang	20 Orang	100%			
2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)	27,6%	21,6%	21,6%	21,6%	100%			
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperentingan	Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)	27,6%	21,6%	21,6%	21,6%	100%			

2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		3090	2117	2117	100%			
		Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi	100 orang							
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal								
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Halal Bagi UMKM			1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemintraan bagi UMKM Kab/Kota Se-Provinsi Jambi			1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM	1 kali							
		Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM	2 kali		1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP	1 kali							
		Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)	150 UMKM							
		Jumlah Workshop Pelatihan Eco Print			1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah Workshop Pelatihan Kerajinan Tangan			1 kali	1 kali	100%			
		Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan	9220 UMKM		2117 UMKM	2117 UMKM	100%			
2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1200 orang							

	Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									
2,17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	0.09	7,5%	7,5%	7,5%				
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah									
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 unit usaha	4 UKM						
		Jumlah promosi /pameran yang diikuti	35 kali	2 Kali						
		Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran	20 UKM	4 UKM						
		Jumlah fasilitasi gelar produk bagi UMKM	12 kali							
		Jumlah UKM yang dipromosikan melalui media cetak /elektronik	10 UMKM	4 UKM						
		Jumlah aplikasi promosi UKM	1 aplikasi							
2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	140 orang							

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dinas Koperasi,UKM

Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 8 program dengan 8 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
- b. Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target, dan tiga indikator tidak mencapai target.
- c. Dari 15 indikator kinerja kegiatan, 14 indikator yang telah memenuhi target, dan satu indikator tidak mencapai target.

2. Perkiraan Capaian Target Review Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi

- a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 8 program dengan 8 indikator kinerja program, dan 15 kegiatan dengan 15 indikator kinerja kegiatan.
- b. Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 7 indikator yang telah memenuhi target, dan satu indikator tidak mencapai target.
- c. Dari 15 indikator kinerja kegiatan, 14 indikator yang telah memenuhi target, dan satu indikator tidak mencapai target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolak ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro. Hasil-hasil pembangunan sektor koperasi dan UMKM tercermin dari indikator makro seperti: PDRB, pertumbuhan koperasi, persentase peningkatan kemitraan, pertumbuhan volume usaha.

Secara rinci fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;

- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
- m. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;

- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Upaya Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Bidang Koperasi dan UKM yang sesuai dengan fungsi diatas dapat dilihat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Persentase koperasi berkualitas
2. Meningkatkan pertumbuhan volume usaha koperasi
3. Meningkatnya usaha kecil menjadi wirausaha
4. Meningkatnya persentase pertumbuhan omset UMKM Binaan
5. Meningkatnya persentase pertumbuhan aset UMKM Binaan
6. Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan;
- 3) Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang Koperasi dan UMKM;
- 4) Fasilitasi Pembiayaan bagi KUMKM
- 5) Fasilitasi Pelatihan bagi SDM KUMKM
- 6) Pemanfaatan PLUT, Tenaga Pendamping Koperasi dan PPKL
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi melaksanakan Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi terdapat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi
Tahun 2025 – 2028

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				2025	2026	2026	2028	2024	2025	2026	2027	
1	Persentase Koperasi Berkualitas		IKK	12%	15%	-		19,49%	-	27,49%	29,49%	
2	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi			6%	7%	-		24,56%	-	5%	5%	
3	Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha		IKK	95%	100%	-		100%	-	-	-	
4	Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan			8,5%	9%	-		13,35 %	-	-	-	
5	Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan			32%	35%	-		57,49 %	-	-	-	
6	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UKM			35%	40%	-		51,36 %	-			
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB			0,71%	0,72%	0,74%	0,76%	-	-	0,72%	0,74%	
8	Rasio Kewirausahaan			5,35%	5,40%	5,47%	5,59%	-	-	5,40%	5,47%	

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Koperasi Berkualitas

Data perkembangan koperasi tahun 2024, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 4.120 unit, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1.949 unit, ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya 2023 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 1.906 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 2,25 persen. Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelebagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha. Dari total koperasi aktif sebanyak 1949 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 609 unit, tahun 2023 sebanyak 605 unit, tahun 2022 adalah sebanyak 389 unit, pada tahun 2021 jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 431 unit data ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 178 unit atau meningkat sebesar 41,29 persen, sedangkan untuk penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 105 unit koperasi, dengan hasil koperasi sehat sebanyak 50 unit, cukup sehat 55 unit.

Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas maka dapat dilihat dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi aktif maka persentase Koperasi Berkualitas diperoleh 19,49 persen untuk tahun 2024, melebihi target indikator kinerja tahun 2024. Namun demikian tetap menjadi perhatian mengingat jumlah koperasi

yang tidak aktif masih tinggi untuk Provinsi Jambi yaitu 52,69 persen dari total seluruh koperasi yang ada.

Penyebab dari tingginya koperasi yang tidak aktif dan rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina Koperasi
2. Kurangnya komitmen Pembina, pengurus dan anggota koperasi dalam mencapai tujuan dari koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya.
3. Masih rendahnya SDM Pengurus Koperasi dalam memahami dan menjalankan system baik itu manajemen maupun keuangan
4. Masih ada anggapan dari pengurus bahwa RAT tidak penting serta kurang pedulinya anggota terhadap pelaksanaan RAT., hal ini masih dibawah target indikator kinerja.

b. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Volume usaha koperasi yang ada di Provinsi Jambi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.261.082.081.591,- Nilai tersebut turun sebesar 3,22% dari volume usaha tahun 2023 yang sebesar Rp1.303.021.915.419,-. Sedangkan Pertumbuhan volume usaha setiap tahun rata-rata menurun 3,22% sejak tahun 2020. Hanya pada tahun 2023 terjadi pertumbuhan yaitu sebesar Rp. 1.303.021.915.419,- (16,43%) dari tahun 2022 Rp. 1.119.192.420.286,-

c. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja. Untuk Omset UMKM terjadi perkembangan dimana pada tahun 2023 berjumlah Rp. 39,311,049,479,621,- menjadi Rp. 44,557,709,760,716,- di tahun 2024 hal ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu meningkat sekitar 13% persen. Persentase pertumbuhan Omset UMKM tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

d. Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2023 Asset UMKM Rp. 3,394,973,249,400,- meningkat menjadi Rp. 5,346,588,248,233,- di tahun 2024 atau meningkat sekitar 57 persen. Persentase asset UMKM ini meningkat melebihi dari target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

d. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja UKM

UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu tahun 2023 berjumlah 373.659 orang menjadi 565.580 orang di tahun 2024 atau meningkat sebesar 51 persen. Ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja.

Tabel 2.3
Perkembangan Kelembagaan Koperasi 2022 s.d 2024

U R A I A N	SATUAN	CAPAIAN TAHUN		
		2022	2023	2024
Perkembangan Koperasi				
Jumlah Koperasi	Unit	3.934	4.151	4.120
Koperasi Aktif	Unit	2.042	1.906	1.949
Koperasi Tidak Aktif	Unit	1.892	2.245	2.171
Jumlah NIK	Unit	514	621	661
Jumlah Anggota	Orang	108.828	120.322	126.589
Koperasi yg melaksanakan RAT	Unit	389	605	609
Jumlah Pengurus	Orang	1.357	1.626	2195
Modal Sendiri	Rp.	1.1012.857.959.677	501.942.128.436	783,125,067,489
Modal Luar	Rp.	274.905.781.815	387.567.834.961	390,643,848,835
Volume Usaha	Rp.	1.119.192.420.286	1.303.021.915.419	1,261,082,081,591
SHU	Rp.	47.282.782.530	63.339.535.411	69,031,722,205

Berdasarkan perkembangan kelembagaan koperasi dari tahun 2022 s.d 2024 dapat diketahui perkembangan jumlah koperasi meningkat namun jumlah koperasi aktif dan koperasi yang melaksanakan RAT dibawah 25 persen dari koperasi aktif, dapat dilihat seperti tabel diatas.

Tabel 2.4

Perkembangan UMKM Tahun 2021 s/d 2024

No	Perkembangan	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Usaha Mikro	Unit	152.477	171.852	189.313	258.790
2.	Jumlah Usaha Kecil	Unit	10.271	9.849	9.608	6.836
3.	Jumlah Usaha Menengah	Unit	2.420	2.341	885	217
4.	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Org	275.577	370.831	373.659	565.580
5.	Jumlah UMKM	Unit	165.168	184.042	199.806	265.843

Berdasarkan tabel perkembangan UMKM Tahun 2021 ke tahun 2024 terjadi peningkatan untuk kategori usaha mikro, sedangkan untuk usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan. Untuk serapan tenaga kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah sejak tahun 2022 merupakan salah satu dinas yang melaksanakan Program Prioritas Provinsi Jambi yaitu Program Dumisake berupa Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM. yang menjadi sasaran penerima bantuan tersebut adalah Usaha Mikro dengan 3 Kriteria yaitu Milenial, Emak-emak dan Wirausaha Pemula. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga UMKM tersebut dapat meningkatkan Omset yang dihasilkan.

Data UMKM Penerima Bantuan Modal Kerja Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PKH				NON PKH				Jumlah
		Mak-mak	Milenial	Wirausaha Pemula	Jumlah	Mak-mak	Milenial	Wirausaha Pemula	Jumlah	Total
1	Kota Jambi	53	11	18	82	49	59	80	188	270
2	Muaro Jambi	35	8	14	57	4	19	13	36	93
3	Batanghari	45	21	14	80	15	38	19	72	152
4	Bungo	4	0	0	4	15	33	35	83	87
5	Tebo	29	13	1	43	19	44	33	96	139
6	Merangin	17	6	6	29	39	42	61	142	171
7	Sarolangun	14	5	16	35	16	18	18	45	80
8	Tanjung Jabung Barat	17	9	18	44	8	40	18	74	118
9	Tanjung Jabung Timur	27	16	22	65	8	31	16	55	120
10	Kerinci	21	8	15	44	21	34	25	80	124
11	Kota Sungai Penuh	18	9	13	40	17	15	26	58	98
Jumlah		280	106	137	523	212	373	344	929	1452
Jumlah Total		523				929				1452

Data UMKM Penerima Bantuan Modal Kerja Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Emak-emak	Milenial	Wirausaha Pemula	Total	Keterangan
1	Kota Jambi	387	11	293	691	
2	Muaro Jambi	187	17	139	343	
3	Batanghari	147	39	161	347	
4	Bungo	98	13	95	206	
5	Tebo	125	31	128	284	
6	Merangin	161	45	144	350	

7	Sarolangun	158	7	165	330	
8	Tanjung Jabung Barat	148	5	137	290	
9	Tanjung Jabung Timur	107	5	134	246	
10	Kerinci	130	14	130	274	
11	Kota Sungai Penuh	116	12	101	229	
Jumlah Total		1764	199	1627	3590	

Data UMKM Penerima Bantuan Modal Kerja Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Emak-emak	Milenial	Wirausaha Pemula	Total	Keterangan
1	Kota Jambi	420	46	316	782	
2	Muaro Jambi	95	33	90	218	
3	Batanghari	34	14	51	99	
4	Bungo	30	37	28	95	
5	Tebo	92	37	64	193	
6	Merangin	90	29	92	211	
7	Sarolangun	82	7	32	121	
8	Tanjung Jabung Barat	53	15	31	99	
9	Tanjung Jabung Timur	42	23	37	102	
10	Kerinci	60	36	29	125	
11	Kota Sungai Penuh	27	20	25	72	
Jumlah Total		1025	297	795	2117	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan produksi.

Sehubungan dengan itu perlu ada analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal (analisis SWOT) yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan.

2.3.1. Kondisi Saat Ini

Pengembangan Koperasi, UKM di Provinsi Jambi pada saat ini dipengaruhi oleh :

- 1. Rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.

2. **Terbatasnya akses sumber daya produktif.** Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia collateral apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
3. **Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Hal ini disebabkan bahwa pendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
4. **Rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik koperasi.

5. **Kurang kondusifnya iklim usaha**, pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perizinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perizinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.3.2. Kondisi yang diharapkan

Untuk mendukung pengembangan Koperasi, UKM di Propinsi Jambi pada saat ini sangat dipengaruhi :

1. **Produktifitas yang tinggi.** Untuk meningkatkan produktifitas perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan UKM.
2. **Akses sumber daya produktif.** Peningkatan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
3. **Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.** Koperasi harus menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance) agar koperasi dapat berkembang secara profesional.
4. **Peningkatan kinerja Koperasi.** Kinerja koperasi yang baik akan dapat membantu peningkatan usaha koperasi.
5. **Iklim usaha yang baik,** Iklim usaha yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu prosedur perizinan yang transparan, biaya transaksi perizinan yang murah, tidak adanya pungutan tidak resmi.

2.3.3. Kondisi Eksternal

1. Peluang

- Tersedianya regulasi yang mendukung perkembangan koperasi dan UMKM.
- Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan peluang pasar yang besar bagi produk-produk UMKM.
- Banyak program-program yang bergerak di sektor padat karya.
- Tersedianya skema kredit bagi koperasi dan UMKM
- Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja baru

2. Ancaman

- Kondisi infrastruktur (jalan, pelabuhan dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antar daerah dan negara.
- Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas).
- Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (entrepreneurship).
- Kualitas produk industri kecil dan menengah rata-rata masih rendah.
- Krisis ekonomi dan krisis finansial global yang bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia, termasuk Jambi.
- Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2.3.4. Kondisi Internal

1. Kekuatan

- Adanya tupoksi dan program kerja Dinas Koperasi, UKM
- Adanya dukungan pembiayaan (APBD/APBN) dan kerjasama stakeholder terkait
- Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat digunakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM
- Dukungan instansi lainnya seperti BUMN, BUMD.

2. Kelemahan

- Keterbatasan tenaga fungsional dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan dan penyuluhan koperasi kepada masyarakat maupun gerakan koperasi.
- Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan terhadap gerakan koperasi dan UMKM
- Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan pengembangan dan program koperasi serta UMKM.

2.3.5. Isu Strategis yang dihadapi

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan

mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

2.3.6 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Terkait Koordinasi dengan Pusat dan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pembangunan Provinsi Jambi diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor koperasi dan UMKM.

Pihak yang paling berperan dalam pengembangan koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Jambi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Koperasi dan UMKM serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Guna mengoptimalkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pembinaan terhadap koperasi dan UMKM yang ada di Jambi, serta dalam menyusun program dan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota dalam bentuk :

1. Melaksanakan rapat koordinasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan dengan dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti Bimbingan teknis, rapat penyusunan perencanaan, rapat teknis perencanaan, rapat regional, rapat koordinasi nasional dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan harapan terdapat sinergitas pembangunan antara pusat dan daerah, sehingga anggaran yang disediakan untuk pembangunan sector koperasi dan UMKM dapat dipergunakan secara optimal dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang pengembangan Koperasi dan UMKM dalam pelayanan kepada Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan

Selain dari hasil analisis di atas terdapat pula isu-isu penting lainnya yaitu :

- 1) Besarnya potensi Koperasi dan UMKM yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- 2) Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- 3) Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- 4) Adanya akses kemudahan Perbankan dan pembiayaan lainnya bagi pelaku Koperasi dan UMKM;
- 5) Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi, UMKM;
- 6) Adanya keanekaragaman produk UMKM yang tersebar;
- 7) Banyaknya usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.
- 8) Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain;
- 9) Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
- 10) Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
- 11) Rendahnya Mutu Produksi UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

Didasari isu-isu tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Provinsi Jambi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan potensi bidang Koperasi, UMKM untuk menangkap peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- 2) Meningkatkan Produktivitas pelaku Koperasi, UMKM;
- 3) Mensosialisasikan kepada seluruh lapisan sosial masyarakat bahwa sektor informal dan formal pada bidang Koperasi, UMKM dapat menjadi

kekuatan ekonomi yang dahsyat, sehingga menarik pemodal untuk berinvestasi pada bidang ini.

- 4) Meningkatkan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM;
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung dalam mengembangkan Koperasi, UMKM;
- 6) Meningkatkan kapasitas/kompetensi Sumber daya pelaku Koperasi, UMKM dalam mendukung keanekaragaman produk;
- 7) Meningkatkan Kerjasama dengan usaha besar dalam mengembangkan Koperasi dan UMKM;
- 8) Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain ;
- 9) Meningkatkan mutu produk UKMM sehingga mampu bersaing dalam era pasar global;
- 10) Mengembangkan potensi Koperasi dan UMKM dengan mempersiapkan SDM yang handal untuk menghadapi pasar global;
- 11) Meningkatkan Teknologi Produksi pelaku UMKM;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, UKM Tahun 2026 disusun berdasarkan atas Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target Renstra, dan target kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, terkait dengan prioritas

program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah. Sehingga dalam mendukung pencapaian kebijakan tersebut maka Dinas Koperasi, UKM menetapkan 8 (delapan) program prioritas yang terdiri atas 1 (satu) program pendukung dan 6 (enam) program pembangunan, serta menetapkan 12 Kegiatan dan 27 sub Kegiatan yaitu :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
 - 2.1.1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - 3.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.1.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
- 4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - 4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 4.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Komeptensi SDM Koperasi
- 5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- 5.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1.1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - 5.1.2 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1.3 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - 6.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 6.1.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan
 - 6.1.2 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
- 7 Program Pengembangan UMKM
 - 7.1 Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - 7.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Secara lengkap Review terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Pagu Indikatif	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			16.883.216.613	2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			14.686.478.674
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Prov Jambi	Pertumbuhan Volume usaha koperasi (%)	251.575.000	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Pertumbuhan Volume usaha koperasi (%)	100.630.000
2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	251.575.000	2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100.630.000
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	251.575.000	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	100.630.000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	130.000.000	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	-
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase jumlah rencana tindaklanjut hasil pengawasan (pemantauan)	65.000.000	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase jumlah rencana tindaklanjut hasil pengawasan (pemantauan)	-
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	65.000.000	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	-
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase koperasi yang diawasi	65.000.000	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase koperasi yang diawasi	-
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	65.000.000	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-

2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prov Jambi	Persentase Koperasi Aktif (%)	70.000.000	2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (%)	80.000.000
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase jumlah rencana koperasi yang dinilai kesehatannya	70.000.000	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase jumlah rencana koperasi yang dinilai kesehatannya	80.000.000
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Prov Jambi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	70.000.000	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Permodalan, kualitas Aktiva, Produktif, Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	80.000.000
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prov Jambi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	130.000.000	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	53.720.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	130.000.000	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	53.720.000
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Prov Jambi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	130.000.000	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	53.720.000
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prov Jambi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	270.000.000	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	106.280.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	Persentase Meningkatnya Produktivitas Koperasi	270.000.000	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase Meningkatkan Produktivitas Koperasi	106.280.000
			Persentase Peningkatan koperasi yang difasilitasi kemitraannya dengan badan usaha					Persentase Peningkatan koperasi yang difasilitasi kemitraannya dengan badan usaha	
			Persentase Koperasi yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha koperasi					Persentase Koperasi yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha koperasi	
2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	140.000.000	2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	54.280.000

2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins		Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	130.000.000	2.17.06.1.01 .0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins		Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	52.000.000,
2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Prov Jambi	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	4.500.000.000	2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	4.489.931.014
			Pertumbuhan wirausaha (%)					Pertumbuhan wirausaha (%)	
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperentingan	Prov Jambi	Persentase Usaha Kecil yang telah dilakukan Penguatan SDM dan Kewirausahaan	4.500.000.000	2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperentingan		Persentase Usaha Kecil yang telah dilakukan Penguatan SDM dan Kewirausahaan	4.489.931.014
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.450.000.000	2.17.07.1.01 .0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	4.464.999.994
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha		Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	50.000.000	2.17.07.1.01 .0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha		Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	24.931.020
2,17.08	Program Pengembangan UMKM	Prov Jambi	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	150.002.000	2,17.08	Program Pengembangan UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	60.022.444
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Prov Jambi	Persentase peningkatan usaha kecil dengan orientasi skala menjadi usaha menengah	150.002.000	2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Persentase peningkatan usaha kecil dengan orientasi skala menjadi usaha menengah	60.022.444
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Prov Jambi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	150.002.000	2.17.08.1.01 .0001	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	60.022.444
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Jambi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	11.381.639.613	2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Nilai AKIP Perangkat Daerah	9.795.895.216
			Indeks Kepuasan masyarakat					Indeks Kepuasan masyarakat	
			Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori PD					Nilai AKIP Perangkat Daerah	

2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersediannya Dokumen Perencanaan	105.870.500	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersediannya Dokumen Perencanaan	79.729.717
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Jambi	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	35.223.000	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	46.143.600
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Jambi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.316.000	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.699.000
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.331.500	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.887.117
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	8.117.697.701	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	6.768.003.485
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.117.697.701	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.768.003.485
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov Jambi	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	20.100.000	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	-
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Prov Jambi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.100.000	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	531.092.788	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	381.579.690
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	14.675.650	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	5.840.000
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75.255.010	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.139.690
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prov Jambi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.480.000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25.000.000	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.000.000
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov Jambi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15.600.000	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.600.000

2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	376.082.128	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.000.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	19.057.500	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	45.444.475
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19.057.500	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45.444.475
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.167.403.124	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.128.827.849
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	260.096.724	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	260.106.249
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prov Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.907.306.400	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.868.721.600
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov Jambi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	420.418.000	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	392.310.000
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov Jambi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	366.920.000	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	366.920.000
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19.610.000	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.390.000
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov Jambi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33.888.000	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota /kabupaten Dalam Provinsi Jambi.

Pada tahun 2026 terdapat Usulan DPRD Provinsi Jambi pada Kabupaten/Kota Dapat dilihat pada tabel 2.4 dan Rumusan Kebutuhan Program dan kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Jambi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program : Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)		Presentase UMKM Binaan		
	KEGIATAN : Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Provinsi Jambi			
	SUB KEGIATAN : Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
			Jumlah UMKM Penerimaan Bantuan Modal Kerja	500	Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, Bappeda dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rancangan Awal RPJMN dirumuskan 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam upaya peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
- 2) Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada Peningkatan PDRB;
- 3) Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik;

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM diantaranya adalah :

- 1) Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- 2) Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi;
- 3) Penguatan kelembagaan Pusat Diklat Koperasi dan UMKM di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian;
- 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota);
- 5) Pengintegrasian Sistem Informasi Debitur (SID) untuk perbankan, KSP, LKM dan lembaga keuangan lainnya;
- 6) Penataan administrasi badan hukum koperasi yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah;
- 7) Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP);
- 8) Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi;
- 9) Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LPP) KUMKM sebagai trading house bagi produk KUMKM secara nasional;
- 10) Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh Koperasi dan UMKM;
- 11) Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM.

Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada

Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia dan menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

- 1) Meningkatkan bantuan permodalan dana bergulir bagi koperasi dan usaha kecil dari pemerintah;
- 2) Meningkatkan bantuan permodalan dari swasta dalam bentuk kemitraan usaha;
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan latihan keuangan pengurus koperasi dan pemilik usaha kecil;
- 4) Meningkatkan kompetensi bisnis pengurus koperasi dan pemilik usaha kecil;

Adapun program di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam,
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi,
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM),
- 7) Program Pengembangan UMKM;

8) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi perlu diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan daya saing UMKM yang berkaitan dengan misi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui perbaikan produktivitas dan nilai tambah produk khususnya bagi usaha mikro yang sebagian besar mencakup masyarakat berpendapatan rendah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, serta perkembangan usahanya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan daya saing UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui fasilitasi bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Fasilitasi tersebut dapat mencakup peningkatan inovasi, penerapan standardisasi dan sertifikasi kualitas proses produksi dan produk, dan peningkatan jangkauan pasar, termasuk ekspor. UMKM juga dapat diperkuat perannya di pasar domestik melalui penurunan biaya transaksi dan promosi penggunaan produk dalam negeri.

Khusus untuk peningkatan daya saing koperasi, upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu mendorong koperasi menjadi lebih mandiri melalui peningkatan dan penguatan partisipasi anggota koperasi untuk mengembangkan usaha bersama. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi sebagai wadah bagi penciptaan efisiensi usaha, peningkatan posisi tawar, dan peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Dampak yang diharapkan yaitu peningkatan kesejahteraan anggota koperasi baik secara ekonomi maupun sosial yang selanjutnya akan berkontribusi pada pencapaian sasaran penanggulangan kemiskinan. Selain itu, perbaikan kinerja usaha anggota koperasi juga diharapkan dapat mendorong kemandirian koperasi yang berlanjut pada peningkatan daya saing koperasi.

Selain peningkatan partisipasi anggota, koperasi juga perlu diperkuat kelembagaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi sehingga dapat merespon perubahan pasar

dengan cepat. Koperasi juga dapat diperkuat manajemennya untuk menjadi pengelola sentra dan organisasi klaster. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi juga perlu diperkuat melalui perluasan keterlibatan UMKM dan koperasi dalam jaringan produksi dan pemasaran, baik regional, nasional maupun internasional.

Perbaikan tata kelola dan kinerja kelembagaan UMKM dan koperasi menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan peluang pengembangan kemitraan, termasuk yang berbasis inovasi, investasi dan ekspor. Penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi juga diharapkan dapat berdampak pada perbaikan struktur pelaku usaha di Indonesia, terutama untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini penting untuk mengoptimalkan pengembangan bidang-bidang usaha tertentu yang akan lebih efisien untuk dijalankan dalam skala kecil dan menengah. UKM juga memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan usaha mikro terutama dalam merespon peluang investasi, kemitraan atau kerja sama usaha, dan perbaikan peraturan, serta perubahan pasar yang dinamis.

Penguatan UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya tenaga kerja yang ada secara optimal. Dalam hal ini, UKM dapat menjadi avalis atau off taker bagi usaha mikro yang mendominasi populasi pelaku usaha di sektor-sektor primer, serta memfasilitasi pengolahan produk primer menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Peningkatan kapasitas UKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan dunia usaha dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan keterbukaan dan peningkatan persaingan pasar. Berbagai upaya penanganan isu daya saing UMKM dan koperasi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan RPJMN 2019-2024 yang berfokus pada pencapaian daya saing kompetitif berdasarkan kemampuan sumber daya alam, SDM dan Iptek.

Kerangka kebijakan yang digunakan dapat dirangkum dalam suatu skenario peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun ke depan seperti diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk meningkatkan skala UMKM dalam rangka penguatan pasar domestik dan pengembangan keunggulan global. Kebijakan difokuskan pada upaya-upaya:
 - a. peningkatan produktivitas UMKM terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), akses ke pembiayaan dan layanan keuangan lainnya, serta penyediaan insentif fiskal dan non fiskal;
 - b. peningkatan inovasi dan penerapan standarisasi proses produksi dan produk/jasa UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan usaha melalui penguatan kemitraan berbasis rantai nilai dan rantai pasok; dan
 - d. peningkatan jangkauan pemasaran produk dan jasa UMKM;

2. Kebijakan pemberdayaan koperasi diarahkan untuk meningkatkan tata kelola usaha koperasi yang difokuskan pada upaya-upaya:
 - a. peningkatan dan penguatan kontribusi anggota dalam memajukan usaha koperasi sehingga terbangun kemandirian koperasi; dan
 - b. modernisasi tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi dalam rangka memperkuat kapasitas koperasi untuk berperan secara optimal dalam pasar domestik dan internasional.

Skenario kebijakan peningkatan daya saing UMKM dan koperasi ke depan juga disusun berdasarkan potensi yang dimiliki oleh UMKM dan koperasi. Potensi terbesar UMKM saat ini yaitu populasinya yang besar, serta karakteristik organisasi dan usahanya yang fleksibel. Populasi UMKM yang besar merupakan modal untuk berkontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan skala produksi dan pemasaran. Fleksibilitas organisasi, tata kerja dan pengelolaan usaha UMKM juga memberi kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Kapasitas Rancangan Teknokratik RPJMN 2019-2024,

UMKM umumnya dibangun dari sumber daya lokal (bahan baku, pengetahuan, keterampilan, dan tenaga kerja) juga menjadikan usahanya dapat menghasilkan produk yang terjangkau bagi masyarakat. Potensi tersebut menjadikan UMKM dapat berkontribusi besar dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Sementara itu sebagai organisasi yang berbasis anggota, koperasi dapat menggunakan kekuatan partisipasi anggotanya untuk membangun kemandirian dan kemajuan usaha. Koperasi juga dapat mengembangkan skala yang memadai untuk UMKM yang bergabung menjadi anggotanya. Cara ini akan memungkinkan koperasi untuk meningkatkan efisiensi usaha bersama mulai dari pengadaan, produksi sampai pemasaran. Dengan misi ekonomi dan sosialnya, koperasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan modal sosial masyarakat serta kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pengembangan UMKM dan koperasi juga didukung ketersediaan payung hukum, sumber daya alam dan SDM. Struktur peraturan yang ada sudah memberikan koridor yang jelas mengenai penyediaan dukungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi ke depan. Ketersediaan sumber daya alam dan skala permintaan yang besar (populasi penduduk yang besar) juga menjadi faktor eksternal pendukung bagi perkembangan UMKM. Adanya budaya gotong-royong juga menjadi cikal bakal bagi perkembangan koperasi. Potensi UMKM dan koperasi juga dapat dilihat dari adanya dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait pengembangan usaha baru dan penguatan UMKM dan koperasi diberbagai sektor dan wilayah.

Namun efektivitas penggunaan berbagai potensi dan sumber daya tersebut masih membutuhkan penanganan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dan koperasi. Beberapa permasalahan umum yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

1. Struktur pelaku usaha nasional masih didominasi oleh usaha mikro yang informal dan memiliki akses ke sumber daya, kapasitas SDM, serta kontribusi yang terbatas;
2. Penurunan kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) di sektor-sektor dengan jumlah UMKM yang besar yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Kondisi ini juga menunjukkan kontribusi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah di sektor-sektor produktif masih rendah;
3. Populasi dan kontribusi PDB usaha kecil dan menengah yang rendah mengkonfirmasi masalah missing middle dalam struktur pelaku usaha;
4. Kesenjangan yang melebar antara produktivitas per unit UMKM dan usaha besar, dan antar UMKM di berbagai sektor;
5. Partisipasi UMKM dalam ekspor masih rendah dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir;
6. Kontribusi UMKM dalam investasi masih lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar; dan
7. Koperasi belum berperan optimal dalam peningkatan efisiensi dan posisi tawar anggotanya.

Ketujuh permasalahan tersebut perlu ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan masalah-masalah spesifik terkait SDM, produksi dan pemasaran, pembiayaan, kelembagaan dan iklim usaha.

3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yaitu “Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian”. Tujuan ini disusun sebagai bentuk komitmen dinas dalam mendukung visi pembangunan daerah Provinsi Jambi, yakni “**MEWUJUDKAN JAMBI MANTAP BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 DIBAWAH RIDHO ALLAH, SWT.**” Lebih khusus lagi, tujuan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap Misi 2, yaitu “**Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.**” Yang dituangkan pada tujuan kedua yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Mengoptimalkan Sektor Unggulan Daerah dan dengan Sasaran yaitu

1. Terwujudnya transformasi digital di Provinsi Jambi
2. Terwujudnya transformasi ekonomi di Provinsi Jambi
3. Meningkatkan produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kualitas layanan izin usaha simpan pinjam
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi
4. Meningkatkan Kualitas SDM Perkoperasian
5. Meningkatkan produktivitas Koperasi
6. Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri
7. Meningkatkan daya saing UMKM
8. Meningkatkan legalitas koperasi

Sasaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 dengan menetapkan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan

Koperasi dan UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada PDRB yang dapat dicapai melalui:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)

Selanjutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan tugas sebagai salah satu OPD yang melaksanakan **Program Unggulan/Prioritas Kepala Daerah dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan tahun 2025 -2029 berupa Quick Wins Program Jaringan Majukan Jambi (PRO JAMBI) Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, Pro Jambi Tangguh dengan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start Up/milenial dengan target 1500 penerima setiap tahun**

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selama Tahun 2026-2030, dijabarkan pada tabel 3.1 :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE :				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian		Kontribusi KUMKM terhadap PDRB	1,02%	1,04%	1,06%	1,08%	1,10%
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada PDRB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,72%	0,74%	0,76%	0,78%	0,79%
			Rasio Kewirausahaan	5,40%	5,47%	5,59%	5,75%	5,84%

Tabel 3.2
Pohon Kinerja Sasaran

Pohon Kinerja Sasaran 1

Visi	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT					
Misi ke-2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah					
Tujuan ke -2 RPJMD	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
Sasaran 2.3 RPJMD	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata					
IKU/IKD RPJMD	Persentase koperasi yang berkualitas					
Tujuan OPD	1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing					
Sasaran OPD	1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas					
Indikator Sasaran	1. Persentase Koperasi Berkualitas					
Program	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintah Daerah Kabupatern/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sub Kegiatan	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian
--------------	---	--	---	--	------------------------------	--	--	---

Pohon Kinerja Sasaran 2

Visi	Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT		
Misi ke-2	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah		
Tujuan ke -2 RPJMD	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Sasaran 2.3 RPJMD	Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata		
IKU/IKD RPJMD	Persentase koperasi yang berkualitas		
Tujuan OPD	Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing		
Sasaran OPD	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas		
Indikator Sasaran	Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha		
Program	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pengembangan UMKM
Kegiatan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Sub Kegiatan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
--------------	---	---	---

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi untuk tahun 2026 telah merencanakan program dan kegiatan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2.1.1 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 3 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 3.1 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 3.1.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
- 4 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 4.1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Komeptensi SDM Koperasi
- 5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 5.1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1.1 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - 5.1.2 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 5.1.3 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 6 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

6.1 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

6.1.1 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi , dan Pengentasan Kemiskinan

6.1.2 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

7 Program Pengembangan UMKM

7.1 Pengembangan Usaha Kecil dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

7.1.1 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Hasil yang diharapkan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yaitu dapat terealisasinya tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan prioritas pembangunan bidang koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

TABEL 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jambi
Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Prov Jambi		14.686.478.674	APBD			20.455.000.000
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume usaha koperasi (%)	Prov Jambi	6%	100.630.000	APBD		5 %	250.000.000
2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	100%	100.630.000	APBD		26,29%	200.000.000
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	Prov Jambi	22 Unit Usaha	100.630.000	APBD		55 Unit Usaha	200.000.000
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase izin Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	-	-	APBD		16%	50.000.000
2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam	Prov Jambi	-	-	APBD		2 Unit Usaha	50.000.000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Prov Jambi	-	-	APBD		12,75%	255.000.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah rencana tindaklanjut hasil pengawasan (pemantauan)	Prov Jambi	-	-	APBD	-	100%	135.000.000

2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan koperasi	Prov Jambi	-	-	APBD		22 Unit Usaha	135.000.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diawasi	Prov Jambi	-	-	APBD		11,9 %	120.000.000
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Prov Jambi	-	-	APBD		22 Unit Usaha	120.000.000
2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	Prov Jambi	94%	80.000.000	APBD		95%	200.000.000
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah rencana koperasi yang dinilai kesehatannya	Prov Jambi	100%	80.000.000	APBD		65.79%	200.000.000
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Prov Jambi	15 Unit Usaha	80.000.000	APBD		22 Unit Usaha	200.000.000
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	Prov Jambi	9.77%	53.720.000	APBD		35,86%	230.000.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Prov Jambi	100%	53.720.000	APBD	-	78 %	230.000.000
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Prov Jambi	25 Orang	53.720.000	APBD	-	80 Orang	230.000.000
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	Prov Jambi	28.52%	106.280.000	APBD	-	29,49%	780.000.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang dilakukan penguatan kelembagaan, usaha, kemitraan dan perlindungan bagi Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prov Jambi	100%	106.280.000	APBD	-	95,97%	780.000.000
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Prov Jambi	-	-	APBD	-	48 Unit Usaha	250.000.000
2.17.06.1.01.0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Prov Jambi	-	-	APBD	-	25 keluarga	20.000.000

2.17.06.1.01.0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan /atau Pendampingan yang dilaksanakan	Prov Jambi	-	-	APBD	-	2 kelompok masyarakat	25.000.000
2.17.06.1.01.0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Prov Jambi	-	-	APBD	-	2 Unit Usaha	30.000.000
2.17.06.1.01.0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Prov Jambi	50 Unit Usaha	54.280.000	APBD	-	54 Unit Usaha	180.000.000
2.17.06.1.01.0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Prov Jambi	-	-	APBD	-	1 Unit Usaha	25.000.000
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provins	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Prov Jambi	23 Unit Usaha	52.000.000	APBD	-	50 Unit Usaha	280.000.000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	Prov Jambi	30%	4.489.931.014	APBD	-	80 %	5.550.000.000
		Pertumbuhan wirausaha (%)	Prov Jambi	30%			-	4,4%	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang telah dilakukan Penguatan SDM dan Kewirausahaan	Prov Jambi	14,34%	4.489.931.014	APBD	-	15,34%	5.550.000.000
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Prov Jambi	899 Unit Usaha	4.464.999.994	APBD	-	150 Unit Usaha	5.260.000.000
2.17.07.1.01.0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasinya	Prov Jambi	-	-	APBD	-	20 Unit Usaha	20.000.000
2.17.07.1.01.0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Terdata	Prov Jambi	-	-	APBD	-	100 Unit Usaha	50.000.000
2.17.07.1.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Prov Jambi	-	-	APBD	-	30 Orang	50.000.000
2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan /Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Prov Jambi	-	-	APBD	-	20 Unit Usaha	20.000.000
2.17.07.1.01.0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Prov Jambi	-	-	APBD	-	20 Unit Usaha	75.000.000
2.17.07.1.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Prov Jambi	30 Unit Usaha	Rp24.931.020	APBD	-	20 Unit Usaha	75.000.000

2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	Prov Jambi	20%	60.022.444	APBD	-	34%	350.000.000
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase peningkatan usaha kecil dengan orientasi skala menjadi usaha menengah	Prov Jambi	2,9%	60.022.444	APBD	-	2,9%	350.000.000
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia Serta Desain dan Teknologi	Prov Jambi	50 Unit Usaha	60.022.444	APBD	-	50 Unit Usaha	250.000.000
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Prov Jambi	-	-	APBD	-	20 Unit Usaha	50.000.000
2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirasaha yang Difasilitasi	Prov Jambi	-	-	APBD	-	200 orang	25.000.000
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Prov Jambi	-	-	APBD	-	25 Unit Usaha	25.000.000
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Prov Jambi	81,6	9.795.895.216	APBD	-	81,7	12.840.000.000
		Indeks Kepuasan masyarakat	Prov Jambi	89,8			-	90	
		Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Kategori PD	Prov Jambi	85			-	85,5	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan	Prov Jambi	100%	79.729.717	APBD	-	100%	310.000.000
		Tingkat Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Sub Kegiatan		2%		APBD	-	2%	
		Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja		100%		APBD	-	100%	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Prov Jambi	2 Dokumen	46.143.600	APBD	-	3 Dokumen	50.000.000
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Jambi	1 Laporan	6.699.000	APBD	-	1 Laporan	100.000.000
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov Jambi	2 Laporan	26.887.117	APBD	-	1 Laporan	60.000.000
2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daerah (data)	Prov Jambi	-	-	APBD	-	2 Laporan	100.000.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Prov Jambi	100%	6.768.003.485	APBD	-	100%	9.000.000.000
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Jambi	49 Orang/ Bulan	6.768.003.485	APBD	-	70 orang	9.000.000.000
2.17.01.1.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD	Prov Jambi	-	-	APBD	-	100%	17.500.000
2.17.01.1.02.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov Jambi	-	-	APBD	-	2 Dokumen	17.500.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	Prov Jambi	-	-	APBD	-	100%	172.500.000

22.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Prov Jambi	-	-	APBD		150 paket	97.500.000
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Prov Jambi	-	-	APBD		100 Orang	75.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov Jambi	100%	381.579.690	APBD		100%	615.000.000
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov Jambi	1 Paket	5.840.000	APBD		10 paket	30.000.000
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Prov Jambi	6 Paket	30.139.690	APBD		4 paket	100.000.000
2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov Jambi	-	-	APBD		700 paket	35.000.000
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov Jambi	1 Paket	20.000.000	APBD		10 paket	30.000.000
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov Jambi	1 Laporan	15.600.000	APBD		250 laporan	20.000.000
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov Jambi	1 Laporan	310.000.000	APBD		1 Laporan	400.000.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov Jambi	100%	45.444.475	APBD		100 %	250.000.000
2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prov Jambi	-	-	APBD		2 Unit	50.000.000
2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov Jambi	-	-	APBD		5 Paket	100.000.000
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Prov Jambi	4 Unit	45.444.475	APBD		4 Unit	100.000.000
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov Jambi	100 %	2.128.827.846	APBD		100 %	1.835.000.000
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov Jambi	1 Laporan	260.106.249	APBD		1 Laporan	435.000.000
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov Jambi	1 Laporan	1.868.721.600	APBD		1 Laporan	1.400.000.000
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prov Jambi	100 %	366.920.000	APBD		100 %	640.000.000
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov Jambi	-	-	APBD		30 Unit	400.000.000
2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Prov Jambi	-	-	APBD		4 Unit	100.000.000
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prov Jambi	23 Unit	15.390.000	APBD		4 Unit	50.000.000

2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prov Jambi	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	90.000.000
-------------------	--	--	------------	--------	------------	------	--	--------	------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah serta untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 yaitu Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026. Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi tahun 2025-2029, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diemban oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rancangan awal Renja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Semoga Rancangan Renja Dinas Koperasi, UKM Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jambi tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.